
ANALISIS DATA PANEL FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**TOTOK SUSILO PAMUJI NUGROHO**STIE Atma Bhakti Surakarta
email : tosiepamuji@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of Original Income (OI), General Allocation Fund (GAF) and Human Development Index (HDI) to capital expenditures (CE). This study used a sample of financial statements issued BPS center years 2010-2013 and BPK RI at 2014. This study using purposive sampling method, as the sample selection with total sample 165. The method of analysis using linear regression panel data. This study uses a period of five years 2010-2014.

The test results H_1 testing shows that PAD positive significant effect on capital expenditure. This may imply that the greater the value of PAD, the greater the value of capital expenditures. While the results of testing H_2 and H_3 shows that DAU and IPM has no effect on capital expenditure.

Keywords : *capital expenditure, original income, general allocation fund and human development index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Faktor-faktor yang diuji adalah Penghasilan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan yang diterbitkan BPS pusat tahun 2010-2013 dan BPK RI tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampel dengan total sampel sebanyak 165. Metode analisis menggunakan regresi linier data panel. Penelitian ini menggunakan jangka waktu selama lima tahun yakni tahun 2010-2014.

Hasil pengujian H_1 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar nilai PAD maka akan semakin besar pula nilai belanja modalnya. Sedangkan hasil pengujian H_2 , dan H_3 menunjukkan bahwa DAU dan IPM tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci : *belanja modal, penghasilan asli daerah, dana alokasi umum dan indeks pembangunan manusia.*

PENDAHULUAN

Infrastuktur yang memadai adalah impian pada setiap pemerintah daerah. Dalam rangka untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai, maka pemerintah daerah harus bisa menganggarkannya pada kelompok belanja modal (Abdullah dan Halim, 2003). Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat jangka panjang, seperti pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa belanja modal merupakan strategi investasi yang baik karena pada umumnya akan mengkondisikan bagaimana keadaan ekonomi suatu instansi (Ozbebek, Canikli dan Ayturk, 2011).

Penyusunan belanja modal pemerintah pusat memberikan kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus rumah tangganya sendiri (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Penyelenggaran kinerja pemerintah daerah secara efektif dan efisien mengatur bagaimana belanja modal perlu disusun agar tujuan pemerintah daerah bisa terlaksana sebagaimana mestinya (Nuarisa, 2013). Oleh karena itu berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2009 penyusunan atas belanja daerah harus tersusun berdasarkan hasil kinerja yang diorientasikan pada capaian perencanaan anggarannya.

Sebagaimana dikatakan oleh Kurniawati (2010) terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi belanja modal yakni PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum). PAD merupakan sejumlah penerimaan daerah yang berasal dari potensi tertentu yang dimiliki wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2004).

Untuk bisa membuktikan tentang kemandirian daerah kita bisa mengambil contoh pada provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan laporan ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) tahun 2013 disebutkan bahwa struktur APBD Jawa Tengah memiliki PAD sebesar Rp 8,212 triliun (61,55%) , dana perimbangan sebesar Rp 2,467 triliun (18,49%) serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 2,662 triliun (19,96%). Kontribusi PAD sebesar 61,55% menunjukkan kemandirian provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi apakah dengan memiliki kemandirian daerah yang besar akan memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal?. Disamping itu terdapat beberapa aspek dalam dana perimbangan seperti DAU dan IPM yang penting sekali diuji pengaruhnya terhadap belanja modal karena dengan mengetahui hal ini maka akan dapat memaksimalkan sistem keuangan daerah. Dengan adanya penelitian yang menggunakan data selama periode lima tahun yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan mencoba

untuk meneliti. Berdasarkan uraian diatas

maka penelitian ini perlu dibuat.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2004). Sedangkan Subagyo (2003) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu fenomena politis yang bisa menyelenggarakan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Dengan adanya otonomi daerah ini maka inilah saatnya bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk menunjukkan kemampuannya (Pratiwi, 2007). Lebih lanjut lagi Pratiwi (2007) menjelaskan bahwa otonomi daerah juga bisa digunakan sebagai tantangan bahwa tiap daerah mampu untuk bisa mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal dan disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggungjawab penuh. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah

Indonesia akan otonomi daerah telah dimulai efektif sejak 1 Januari 2001 dan dianggap merupakan suatu kebijakan yang dipandang sangat memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Dengan adanya sistem desentralisasi keuangan maka konsekuensi dari adanya kewenangan untuk bisa mengelola keuangan secara mandiri (Halim, 2009).

Dengan adanya otonomi daerah maka sistem pemerintahan daerah diharuskan untuk dikelola dan dimajukan aset maupun sumber dayanya (Aji, Kirya dan Susila, 2015). Oleh karena itu sangat penting sekali untuk merumuskan apa saja yang mempengaruhi aset dan sumber daya di pemerintah daerah.

Sistem Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu proses menstansfer sumber daya dari pemerintahan yang tingkat sumber dayanya tinggi menuju ke tingkat yang rendah (Falleti, 2004). Selanjutnya, Falleti (2004) menegaskan bahwa desentralisasi merupakan suatu bentuk konsep autorisasi sebagai konteks demokrasi. Pengembangan dan transisi ekonomi suatu

daerah akan mengalami kesenjangan fiskal dengan sistem terpusat (sentralisasi), oleh karena itu sistem desentralisasi merupakan solusi untuk menangani hal ini (Bardhan, 2002). Lebih lanjut Bardhan (2002) menegaskan bahwa desentralisasi merupakan suatu kerangka kelembagaan utama yang sangat penting bagi pertumbuhan industri dan ekonomi suatu pemerintahan. Klibanoff dan Poitevin (2013) menegaskan bahwa desentralisasi merupakan suatu alternatif dimana setiap daerah memiliki hak yang sama dengan pemerintahan pusat.

Sistem desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia mengharuskan sebagian besar sumber-sumber penerimaannya di miliki oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah mendapatkan penerimaan dana bagi hasil dana alokasi khusus dan dana alokasi umum (Sasana, 2015).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam

mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi (Nuarisa, 2013). Berdasarkan penelitian dari Arwati dan Hadiati (2013), Nuarisa (2013) dan Palealu (2013) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi berbeda dengan Wandira (2013) serta Oktora dan Pontoh (2013) yang mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini, peneliti menghipotesiskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat PAD maka akan semakin tinggi pula tingkat komponen belanja modal, mengingat PAD merupakan salah satu aset terbesar pemerintah daerah. Dengan demikian, tentu saja akan terdapat keterkaitan dengan belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$$H_1 = PAD \text{ berpengaruh positif terhadap } \\ \text{belanja modal}$$

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 DAU merupakan dana yang dihibahkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari pemerataan antar daerah, sehingga penting sekali untuk masing-masing daerah. Budiarti (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi DAU yang diberikan pemerintah pusat maka ketergantungan pemerintah daerah dalam kegiatan belanja modal akan besar pula. Penelitian dari Wandira (2013), Nuarisa (2013) serta Oktora dan Pontoh (2013) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi bertentangan dengan Arwati (2013) dan yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini, peneliti menghipotesiskan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini merujuk pada penelitian Arwati (2013) yang menjelaskan bahwa DAU akan dapat memberikan kontribusi serta kepastian bagi setiap daerah dalam hal perolehan sumber-sumber pembiayaan dalam rangka sebagai pembiayaan kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan

uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$$H_2 = \text{DAU berpengaruh positif terhadap} \\ \text{belanja modal}$$

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Belanja Modal

IPM mengukur tingkatan kehidupan manusia berdasarkan tataran dari tiga dimensi antara lain umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak (BPS, 2008). Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan fasilitas masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menghipotesiskan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap belanja modal hal ini sesuai dengan penelitian Widiagma (2015) yang menjelaskan bahwa IPM berpengaruh terhadap belanja modal jadi semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula belanja modalnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

$$H_3 = \text{IPM berpengaruh positif terhadap} \\ \text{belanja modal.}$$

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, data diambil dari laporan terbitan BPS nasional periode 2010 sampai dengan 2013. Periode ini merupakan terbitan terakhir dari BPS nasional, sedangkan untuk tahun terakhir yakni tahun 2014 menggunakan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang telah diaudit oleh BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) dari masing-masing kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia. Metode analisis data menggunakan regresi berganda, metode ini digunakan untuk menilai pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan

Sampel dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh laporan realisasi anggaran kota / kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia yang telah di audit oleh BPK RI serta telah diterbitkan oleh BPS Jawa Tengah periode 2010-2013, serta laporan LKPD dari BPK RI tahun 2014 yang belum diterbitkan pihak BPS. Laporan realisasi

anggaran yang diterbitkan oleh BPS terdiri dari dua yakni laporan realisasi anggaran kabupaten/ kota dan laporan realisasi anggaran provinsi. Laporan realisasi anggaran kabupaten / kota adalah laporan realisasi yang berasal dari masing-masing kabupaten/ kota diseluruh Indonesia. Sedangkan laporan realisasi anggaran provinsi adalah laporan realisasi yang khusus berasal dari pemerintah provinsi.

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh kota/ kabupaten dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 33 dimana terdiri dari 33 provinsi dan laporan realisasi gabungan tiap masing-masing kota/kabupaten di seluruh Indonesia yang dituangkan menjadi satu dengan laporan realisasi anggaran masing-masing pemerintah provinsi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono (2007) alasan pengambilan *purposive sampling* ini didasari pada pengambilan sampel berdasarkan penilaian

peneliti tentang apa saja yang layak dan pantas untuk dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh kota / kabupaten dan pemerintah provinsi seluruh Indonesia dimana berjumlah 33 provinsi.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan data panel sehingga regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu atau ruang).

HASIL DAN ANALISIS DATA

Pengujian ini dilakukan dengan dua tahap uji bagi masing-masing variabel bebas, yaitu dengan menguji signifikansi *p-value* terhadap tingkat signifikansi yang ditentukan dengan melihat pada tabel pengujian *fixed effect* dan uji arah atas nilai koefisiennya.

Pengujian signifikansi yang telah dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat pada *p-value* . Dari hasil regresi yang didapatkan dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) variabel PAD memiliki *p-value* sebesar 0.0002. Karena nilai tersebut < 0.05 maka PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengujian yang kedua dilakukan dengan uji arah untuk menentukan apakah

hubungan kedua variabel merupakan hubungan yang searah atau tidak dengan melihat nilai koefisiennya. Nilai koefisien PAD terhadap belanja modal sebesar 0.497630 hal ini berarti hubungan yang bersifat searah dan juga setiap nilai PAD naik Rp 1,- maka nilai belanja modal naik 0.497630.

Hasil dari penelitian ini berlawanan dengan Wandira (2013) serta Oktora dan Pontoh (2013) yang mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi hasil ini sesuai dengan H_1 dalam penelitian ini dimana PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. H_1 didukung pula oleh penelitian-penelitian sebelumnya antara lain : Arwati dan Hadiati (2013), Nuarisa (2013) dan Palealu (2013). Hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana PAD telah disusun sesuai dengan tingkat kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berarti pada setiap penyusunan APBD apabila pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah dengan cara mempertimbangkan PAD yang diterima. Berarti dalam hal ini antara PAD dan belanja

modal memiliki hubungan timbal balik dalam bidang keuangan daerah. Berdasarkan hal itu dapat dijelaskan bahwa semakin besar PAD suatu daerah maka akan semakin besar pula belanja modalnya.

Uji signifikansi yang telah dilakukan terhadap DAU dapat dilihat pada nilai *p-value*. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) DAU memiliki *p-value* sebesar 0.3431. Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini menolak H_2 dalam penelitian ini. Dikarenakan tidak berpengaruh antar kedua variabel maka analisis mengenai uji arah tidak diperlukan lagi. Hasil ini berlawanan dengan Nuarisa (2013), serta Oktora dan Pontoh (2013) yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil dari pengujian ini sebenarnya cukup menarik dimana seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat yang intinya digunakan sebagai bentuk desentralisasi kepada pemerintah daerah seharusnya berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hasil dari penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) yang menggunakan data sampel kabupaten/ kota se-Jawa dan Bali dengan menggunakan SEM (*Structural Equation Model*). Hasilnya membuktikan bahwa indikasi belanja modal sangatlah ditentukan oleh faktor DAU. Akan tetapi Wandira (2013) menjelaskan bahwa DAU lebih banyak digunakan dalam hal pembiayaan lain seperti belanja pegawai maupun barang dan jasa, bukan dialokasikan untuk belanja modal. Kusnandar dan Siswantoro (2012) juga menjelaskan hal yang hampir serupa dimana DAU memungkinkan daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhannya sendiri sebagai bagian dari otonomi daerah dan juga DAU yang diterima oleh daerah cenderung digunakan untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai dan hanya sedikit untuk belanja modal.

Pengujian signifikansi yang telah dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari nilai *p-value*. Dari hasil pengujian di dapatkan bahwa apabila tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 5\%$) variabel IPM memiliki *p-value* sebesar 0.0708. Berdasarkan nilai tersebut $>$

0.05 maka variabel ini berada pada daerah penolakan H_3 yang menyatakan IPM berpengaruh terhadap belanja modal. Dikarenakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel maka analisis mengenai uji arah tidak diperlukan lagi.

Hasil dari pengujian ini berbeda dengan penelitian Widiagma (2015) yang menjelaskan bahwa IPM berpengaruh terhadap belanja modal. semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula belanja modalnya. IPM dibagi menjadi tiga yakni pendidikan, umur panjang dan standar hidup yang layak. Berdasarkan UNDP dalam BPS, UNDP mengukur standar hidup yang layak menggunakan PDB/ PDRB. Penelitian dari Tuasikal (2008) mendukung hal ini dimana pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi khususnya dalam penganggaran belanja modal kurang memperhatikan PDRB sebagai salah satu penentu utama dalam pengalokasian belanja modal. Lebih lanjut lagi Tuasikal (2008) menjelaskan bahwa keterlambatan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam menetapkan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Jadi dalam hal ini apabila PDRB kurang diperhatikan maka standar kehidupan yang layak belum terjamin, sehingga dalam penelitian ini IPM tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal sehingga semakin besar PAD semakin besar pula nilai belanja modalnya.
2. DAU dan IPM tidak berpengaruh terhadap belanja modal sehingga semakin besar DAU dan IPM tidak akan berpengaruh terhadap nilai dari belanja modal.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

- a. Variabel independen yang digunakan hanya terbatas hanya empat saja. Peneliti belum mencoba beberapa alternatif variabel lain yang kemungkinan berpengaruh

terhadap belanja modal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel ataupun bisa menambah variabel kontrol, moderasi maupun mediasi.

- b. Dengan menggunakan data panel akan dapat memodelkan pengujian secara lebih lengkap serta dapat menggambarkan adanya dinamika

perubahan akan tetapi peneliti hanya terbatas menggunakan data selama periode lima tahun saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah estimasi periode jumlah tahun pada data penelitiannya agar pengukuran serta hasilnya yang akan berbeda dan menjadi lebih menarik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan A. Halim. 2003. *Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah : studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI: Surabaya.
- Aji, B.P, I.K Kirya, G. P. A. J Susila. 2015. *Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng*. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Arwati, D., dan N. Hadiati. 2013. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat*. Working paper, Universitas Widyatama Bandung.
- Bardhan, P. 2002. Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspective* 16 (4) : 185-205.
- Budiarti, P. 2014. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap struktur belanja daerah*. Working paper, Universitas Brawijaya.
- Falleti, T. G. 2004. *A sequential theory of decentralization and its effects on the intergovernmental balance of power: Latin American cases in comparative perspective*. Working paper, Kellogg Institute.
- Halim, Abdul. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hariato, D., dan P. H. Adi. 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita*. Simposium Nasional Akuntansi X : Makasar.
- Kurniawati, F. R. 2010. *Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia*. Tesis. Tidak dipublikasikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kusnandar dan Siswantoro, D. 2012. *Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal*. Working paper, Universitas Indonesia.
- Klibanoff, P., dan M. Poitevin. *A theory of (de)centralization*. Working paper: Northwestern University.
- Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1) : 89-94.
- Oktora, F.E dan W. Pontoh. 2013. Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability* 2 (1) : 1-26
- Ozbebek, A., S. Canikli., dan Y. Ayturk. 2011. Does Turkish Stock Market React to Public Announcements of Major Capital Expenditures?. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 24 : 928-934.
- Palealu, A. M. 2013. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. *EMBA* 1(4) : 1189-1197.

- Pratiwi, M.U. 2007. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah. Tesis. Tidak Dipublikasikan . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.125. Sekretariat Negara. Jakarta.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Departemen dalam Negeri. Jakarta.
- , 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Departemen dalam Negeri. Jakarta.
- , 2008. *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- , 2009. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Departemen dalam Negeri. Jakarta.
- , 2013. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013*. Pemerintah Provinsi. Semarang.
- Sasana, H. 2015. *Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di provinsi Indonesia*. Media Ekonomi dan Manajemen
- Subagyo, H. 2003. Pengembangan ekonomi rakyat di era otonomi daerah. Diakses tanggal 21 Desember 2015. www.jurnalekonomirakyat.org.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten / Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* 1(2) : 142-155.
- Wandira, A.B. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1) : 45-50.
- Widiagma, A. P. 2015. *Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur*. Working paper, Universitas Jember.